

**ANALISIS PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
(BBNKB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**(Studi Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah
2019 - 2021)**



MANUSKRIP

Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)

Pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Semarang

Disusun oleh

SHABRINA MIRZA ANDINI

NIM. E2B 018045

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

2022

**ANALISIS PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
(BBNKB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
(Studi Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2019 – 2021)**

Shabrina Mirza Andini¹, Fatmasari Sukesti², Andwiani Sinarasri³

Universitas Muhammadiyah Semarang

Email : shabrinamirza17@gmail.com

Intisari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pemerintah daerah juga mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana target yang sudah ditetapkan tidak tercapai. Pandemi Covid – 19 mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2021 penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan penerimaan khususnya pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat lebih mengutamakan untuk biaya hidup sehari – hari daripada untuk membayar biaya pajak (Widasena, 2022). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian kali ini terdiri dari 3 (tiga) variable Independen (X) yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bela Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) serta variabel dependen (Y) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Beal Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pendapatan asli Daerah

ABSTRACT

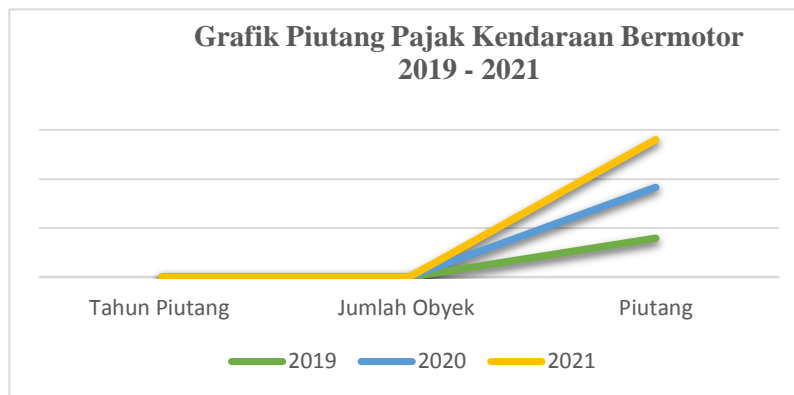
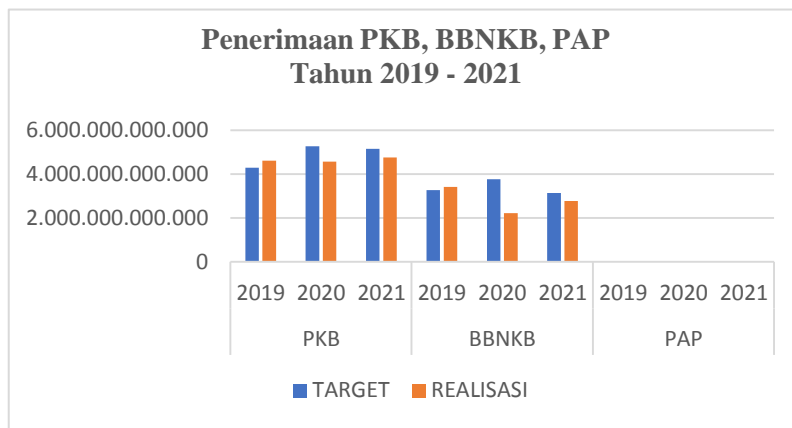
Governments to fund the implementation of regional autonomy in accordance with regional potential as a manifestation of decentralization. Local governments have also experienced a decrease in Regional Original Income (PAD) where the targets set have not been achieved. The Covid – 19 pandemic, starting from 2020 to 2021, regional tax revenues for the province of Central Java have decreased in revenue, especially for Motor Vehicle Tax (PKB) and Motorized Vehicle Transfer Fee Tax (BBNKB). This is due to a decrease in people's economic income so that people prefer to pay for their daily living expenses rather than paying taxes (Widasena, 2022). This study uses data collection methods obtained from the Central Java Provincial Revenue Management Agency with a quantitative approach. The variables used in this research consist of 3 (three) independent variables (X), namely Motor Vehicle Tax (PKB), Transfer of Regional Original Revenue (PAD) aims to give authority to regional Motor Vehicle Names (BBNKB), and Surface Water Tax (PAP) and the dependent variable (Y), namely Income Original Area (PAD). Motorized Vehicle Tax has no effect on Regional Original Income, Motor Vehicle Title Transfer Fee has a positive effect on Regional Original Revenue, Surface Water Tax has no effect on Regional Original Revenue, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Title Transfer Fee, Surface Water Tax simultaneously has an effect on Revenue Regional Original.

Keyword : Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Name Transfer Fees, Surface Water Tax ,Genuine Income

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah berperan sangat penting untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Salah satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan ini diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah.

Pemerintah daerah mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana target yang sudah ditetapkan tidak tercapai. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari wawancara bersama Kepala Sub Bidang Bagian Pelaporan dan Keberatan Pajak, pada saat pandemi Covid – 19 mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2021 penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan penerimaan khususnya pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat lebih mengutamakan untuk biaya hidup sehari – hari daripada untuk membayar biaya pajak (Widasena, 2022).



Sumber : Data yang Diolah dari Bapenda Prov Jateng

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan dikarenakan tingginya piutang / tunggakan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak, yaitu sebesar Rp 1.402.026.485.694 atau 0,069% dengan total objek pajak sebanyak 3.270.462 dari 37 UPPD di seluruh Jawa Tengah. Tingginya piutang yang ada di provinsi Jawa Tengah disebabkan kurang optimalnya inovasi UPPD untuk melakukan kegiatan dor to dor di setiap daerah. Maka hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya piutang pajak kendaraan bermotor dikarenakan kurangnya antusias masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya (Heny Herlina,2022).

Selain adanya piutang Pajak Kendaraan Bermotor dalam 3 tahun mengalami kenaikan, pada pajak air permukaan juga mengalami penurunan pendapatan karena mengalami pengurangan salah satu penyebabnya yaitu berkurangnya debit air permukaan sehingga penggunaan air menjadi berkurang, serta adanya piutang wajib pajak (perusahaan) dan daerah yang belum membayar kewajibannya. Dari ketiga variabel yang ada pada penelitian ini yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan, yang mengalami penurunan signifikan adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 sebesar 59,1%.

Dari fenomena diatas, masih terdapat banyak perbedaan pendapat antara penelitian satu dengan penelitian lainnya mengenai pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah serta peran pajak daerah dalam memenuhi target penerimaan realisasi pendapatan daerah. Kondisi saat ini Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang memiliki jumlah penerimaan terbesar mengalami penurunan sedangkan Pajak Air Permukaan yang memiliki jumlah penerimaan terkecil tetapi selalu mengalami peningkatan, maka penelitian ini penting untuk dilakukan dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Jawa Tengah. Sehingga penelitian ini mengambil judul “ **ANALISIS PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI JAWA TENGAH 2019 – 2021.**

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Konstitusional

Teori Institusional dikemukakan oleh Scoot (2008) menjelaskan bahwa teori ini digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Teori Institusional (*Institusional Theory*) atau teori kelembagaan yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan institusionalisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini yaitu pemikiran

bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah serta layak untuk di dukung (Ridha & Basuki, 2012).

Teori institusional relevan untuk menjelaskan penelitian ini karena suatu organisasi (instansi) yang mempunyai aturan (kebijakan) yang diperuntukan untuk masyarakat terutama wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Selain itu, teori institusional juga memiliki beberapa faktor yang mendukung suatu kebijakan sehingga mampu meyakinkan publik atau masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Faktor – faktor tersebut diantaranya yaitu, faktor eksternal, faktor sosial, faktor lingkungan, dan faktor ekspetasi masyarakat.

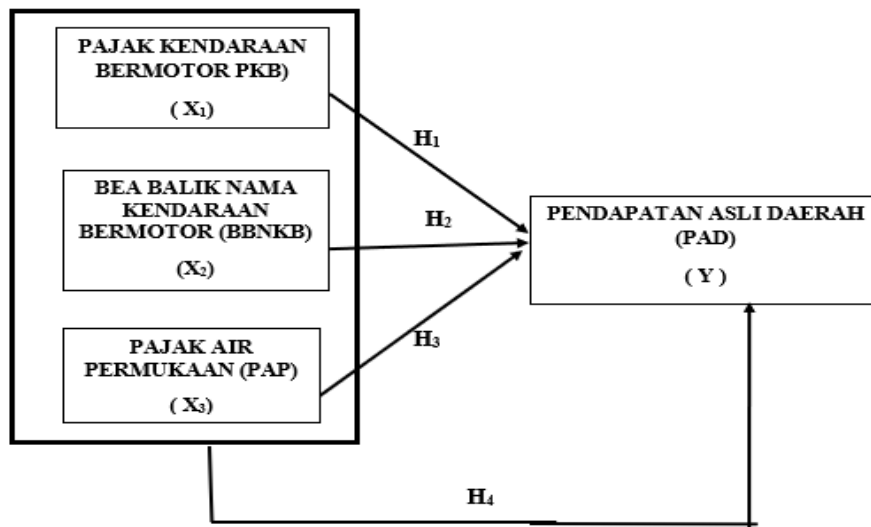
Suatu organisasi atau institusi diharuskan membuat sebuah kebijakan dimana mengharuskan masyarakat atau publik patuh pada kebijakan yang telah dibuat guna untuk mencapai tujuan. Faktor – faktor yang ada pada teori institusional mengharuskan suatu organisasi atau instansi mempunyai sebuah kebijakan yang sesuai dengan lingkungan serta ekspetasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mampu menerima dan mengikuti kebijakan dengan baik. Teori Institusional berhubungan dengan variabel independent yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah mempunyai kebijakan – kebijakan diatur oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan lain – lain. Kebijakan yang ada di pendapatan asli daerah dibuat serta disesuaikan dengan lingkungan dan ekspetasi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat patuh dan menerima kebijakan yang telah dibuat.

Pengembangan Hipotesis

Putri & Zahra (2020), A.A Nurfahmi (2018), Saputra & Putri (2018) dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Savitri & Anggraeni

(2021), Pontoh Irene F (2020) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Bea Balik Nama kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. **Delima** (2022) dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa variabel Pajak Air Permukaan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kerangka Pikiran



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal komparatif (*causah comperative*). Penelitian kausal komparatif merupakan penelitian untuk mengetahui korelasi antar dua variabel atau lebih yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2019).

Definisi Operasional

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut UU N0. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen. Besarnya nilai PKB dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak x (NJKB x Bobot)}\end{aligned}$$

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menurut Pergub Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2019 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kemauan wajib pajak dalam membayar biaya bea balik nama kendaraanya salah satu bentuk kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Besarnya nilai BBNKB dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak x Nilai Jual Kendaraan Bermotor}\end{aligned}$$

Pajak Air Permukaan (PAP) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi terhadap pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan (Ayza, 2017). Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik

yang berada di laut maupun di darat. Wajib Pajak untuk pajak air permukaan merupakan bentuk kepedulian terhadap air permukaan yang terdapat di Jawa Tengah. Tetapi banyak wajib pajak yang kurang sadar dalam kontribusi membayar pajak air permukaan. Besarnya nilai PAP dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air Permukaan}\end{aligned}$$

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah UPPD Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 37 UPPD. Sedangkan sampel penelitian berdasarkan metode *Cluster Random Sampling* yang diperoleh dari UPPD Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga, jumlah data sampling yang memenuhi syarat penelitian ini sebanyak 101.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif
2. Uji Asumsi Klasik : Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas
3. Analisis Regresi Linier Berganda
4. Uji Hipotesis : Koefisien Determinasi Berganda, Uji Parsial (Uji – t), Uji Koefisien Determinasi Berganda (R Square), Uji Simultan (Uji – F)

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| X1 | 101 | 5,56 | 2,45 | 1,232 | 4,793 |
| X2 | 101 | 1,40 | 1,69 | 7,567 | 3,302 |
| X3 | 101 | 1,08 | 3,82 | 4,714 | 7,260 |
| Y | 101 | 7,75 | 4,14 | 1,994 | 7,736 |
| Valid N (listwise) | 101 | | | | |

- a. Penelitian ini menggunakan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel independent yang pertama. Hasil analisis statistik deskriptif menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor tahun 2019 – 2021 mempunyai nilai maksimum sebesar 2,45 dengan nilai minimum 5,56 menghasilkan nilai rata – rata sebesar 1,232 dengan standar deviasi sebesar 4,793, yang artinya pajak kendaraan bermotor memiliki nilai rata – rata dan standar deviasi yang rendah.
- b. Penelitian ini menggunakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai variabel yang kedua. Hasil analisis statistik deskriptif menjelaskan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019 – 2021 mempunyai nilai maksimum sebesar 1,69 dengan nilai minimum 1,40 menghasilkan nilai rata – rata sebesar 7,567 dengan standar deviasi sebesar 3,302 , yang artinya bea balik nama kendaraan bermotor memiliki nilai rata – rata dan standar deviasi yang rendah.
- c. Penelitian ini menggunakan Pajak Air Permukaan sebagai variabel independent yang ketiga. Hasil analisis deskriptif menjelaskan bahwa pajak air permukaan tahun 2019 – 2021 memiliki nilai maksimum sebesar 3,82 dengan nilai minimum 1,08 menghasilkan nilai rata – rata sebesar 4,7149E+11 dengan standar deviasi

sebesar 7,260, yang artinya pajak air permukaan memiliki nilai rata – rata yang rendah tetapi nilai standar deviasi yang tinggi.

- d. Penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen. Hasil analisis menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah tahun 2019 – 2021 memiliki nilai maksimum sebesar 4,14 dengan nilai minimum 7,75 menghasilkan nilai rata – rata 1,994 dengan standar deviasi sebesar 7,736, yang artinya pendapatan asli daerah memiliki nilai rata – rata dan standar deviasi yang rendah.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 101 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000169 |
| | Std. Deviation | ,00010633 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,083 |
| | Positive | ,082 |
| | Negative | -,083 |
| Test Statistic | | ,083 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,081^c |

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* pada table menjelaskan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar $0,81 > 0,05$ yang artinya data terdistribusi dengan normal

Hasil Uji Multikolinearitas

| Coefficients ^a | | | |
|---------------------------|------------|-------------------------|-------|
| Model | | Collinearity Statistics | |
| | | Tolerance | V IF |
| 1 | (Constant) | | |
| | X1 | ,333 | 3,002 |
| | X2 | ,334 | 2,994 |
| | X3 | ,984 | 1,016 |

Berdasarkan tabel menjelaskan bahwa untuk seluruh variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air permukaan memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Sedangkan pada nilai VIF lebih dari 0,10 berarti model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas.

| Coefficients | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficient | <i>t</i> | <i>Sig.</i> |
| | | B | <i>Std. Error</i> | <i>Beta</i> | | |
| 1 | (Constant) | -0,01 | ,000 | | -1,726 | ,088 |
| | X1 | 4,28E-6 | ,000 | ,022 | ,139 | 0,89 |
| | X2 | 3,34E-5 | ,000 | ,242 | 1,492 | 0,139 |
| | X3 | -3,58E-6 | ,000 | ,077 | -,785 | 0,434 |

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa nilai probabilitas (*Sig.*) yang dimiliki variabel independen PKB, BBNKB, PAP beturut – turut 0,89, 0,139, dan 0,434. Hal tersebut menjelaskan bahwa ketiga variabel independen pada penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, karena nilai probabilitas (*Sig.*) dari ketiga

variabel independennya memiliki nilai diatas signifikansi yaitu 0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas

Hasil Uji Autokorelasi

| Model Summary ^b | | | | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,357 ^a | ,127 | ,100 | ,000065528 | 1,773 |
| a. Predictors: (Constant), PAP, BBNKB, PKB | | | | | |

N = 101

d = 1,773

dl = 1,613

du = 1,736

4-dl = 2,387

4-du = 2,264

Hasil = $du < d < 4-du = 1,736 < 1,773 < 2,387$

Kesimpulan : Tidak Terdapat Autokorelasi

Berdasarkan tabel perhitungan menggunakan SPSS menggunakan uji Durbin Watson memperoleh hasil sebesar 1,773. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 dengan 101 unit analisis, sehingga diperoleh dilai Du sebesar 1,736 dan nilai DL sebesar 1,613. Maka dapat dirumuskan $du < d < 4-du = 1,736 < 1,773 < 2,387$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak mengandung gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 4,466E-5 | ,000 | | 2,437 | ,017 |
| | X1 | -2,168E-16 | ,000 | -,150 | -,915 | ,362 |
| | X2 | 9,391E-16 | ,000 | ,449 | 2,735 | ,007 |
| | X3 | -1,444E-14 | ,000 | -,152 | -1,587 | ,116 |

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat nilai konstanta sebesar 4,466E-5, untuk nilai beta variabel PKB (X1) adalah sebesar -2,168E-16, variabel BBNKB (X2) sebesar 9,391E-16, dan variabel PAP (X3) sebesar -1,444E-14. Sehingga persamaan regresinya dapat dirumuskan, sebagai berikut :

$$Y = 4,466E-5 - 2,168E-16(X1) + 9,391E-16(X2) - 1,444E-14(X3) + e$$

Berdasarkan hasil persamaan diatas maka, dapat disimpulkan bahwa

1. Nilai koefisien regresi sebesar -2,168.000.000,16 menunjukkan setiap peningkatan pajak kendaraan bermotor sebesar 1 satuan dapat menyebabkan penurunan pengeluaran sebesar 2.168.000.000,16 satuan
2. Nilai koefisien regresi sebesar 9.391.000.000,16 menunjukkan setiap peningkatan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 1 satuan dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran sebesar 9.391.000.000,16 satuan
3. Nilai koefisien regresi sebesar -1.444.000.000,14 menunjukkan setiap peningkatan pajak air permukaan sebesar 1 satuan dapat menyebabkan penurunan sebesar 1.444.000.000,14 satuan.

UJI HIPOTESIS

Hasil Uji Parsial

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig . |
| | | B | Std . Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 4,466E-5 | ,000 | | 2,437 | ,017 |
| | X1 | -2,168E-16 | ,000 | -,150 | -,915 | ,362 |
| | X2 | 9,391E-16 | ,000 | ,449 | 2,735 | ,007 |
| | X3 | -1,444E-14 | ,000 | -,152 | -1,587 | ,116 |

1. Variabel PKB tidak berpengaruh terhadap PAD terbukti nilai t_{hitung} sebesar $-0,915 < t_{tabel} 1,985$ dan nilai signifikansi sebesar $0,362 > 0,05$ serta nilai β sebesar $-2,168E-16$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel PKB tidak berpengaruh terhadap PAD. Sehingga H1 yang menyatakan bahwa PKB berpengaruh positif terhadap PAD dinyatakan **ditolak**.
2. Variabel BBNKB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD terbukti nilai t_{hitung} sebesar $2,735 > t_{tabel} 1,985$ dan nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ serta nilai β sebesar $9,391E-16$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel BBNKB berpengaruh positif terhadap PAD. Sehingga H2 yang menyatakan bahwa BBNKB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD dinyatakan **diterima**.
3. Variabel PAP tidak berpengaruh terhadap PAD terbukti nilai t_{hitung} sebesar $-1,587 < t_{tabel} 1,985$ dan nilai signifikansi sebesar $0,116 > 0,05$ serta nilai β sebesar $-1,444E-14$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel PAP tidak berpengaruh terhadap PAD. Sehingga H3 yang menyatakan bahwa PAP berpengaruh positif terhadap PAD dinyatakan **ditolak**.

Hasil Uji R2

| Model Summary^b | | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,357 ^a | ,127 | ,100 | ,000065528 |

Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinan (R Square) sebesar 0,127 atau 12,7%. Maka, PKB, BBNKB, PAP dapat dikatakan mempunyai pengaruh yang rendah terhadap variabel PAD. Lalu, sisanya sebesar 87,3% adalah nilai pengaruh yang asalnya dari variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

| ANOVA^a | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|-----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | ,000 | 3 | ,000 | 4,718 | ,004 ^b |
| | Residual | ,000 | 97 | ,000 | | |
| | Total | ,000 | 100 | | | |

Hasil Uji Simultan

Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 4,718 dengan nilai probabilitas (Sig.) 0,004. Hal tersebut berarti H4 diterima karena nilai probabilitas (Sig.) sebesar $0,004 < 0,05$. Dengan adanya pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa PKB, BBNKB dan PAP secara simultan atau bersama-

sama berpengaruh positif terhadap PAD sesuai dengan hipotesis yang telah dibangun sebelumnya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik t menunjukkan bahwa variabel independen pajak kendaraan bermotor mempunyai hubungan negatif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar $-0,915 < t_{tabel}$ 1,985 dan nilai signifikansi sebesar $0,362 > 0,05$ serta nilai β sebesar $-2,168E-16$. Maka, hipotesis H1 ditolak. Hal ini disebabkan karena pada hasil uji statistik deskriptif variabel pajak kendaraan bermotor memiliki nilai rata – rata rendah yaitu sebesar 1,232. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Nugrahawati (2019) menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 – 2021 mengalami penurunan penerimaan dikarenakan adanya wabah Covid – 19 yang menyebabkan wajib pajak tidak membayarkan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya. Selain itu masih banyaknya wajib pajak yang menunggak pajaknya sehingga menimbulkan piutang yang tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Nugrahawati (2019) yang menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pada saat wabah Covid – 19 banyak kebijakan baru yang dibuat oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan kondisi dan lingkungan masyarakat. Hal tersebut relevan dengan teori konstitusional yang dimana teori tersebut menjelaskan kebijakan organisasi harus sesuai dengan ekspektasi, kondisi, dan lingkungan masyarakat, agar masyarakat dapat mematuhi kebijakan tersebut.

Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli daerah

Berdasarkan hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki hubungan yang positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dibuktikan bahwa nilai t_{hitung} sebesar $2,735 > t_{tabel}$ 1,985 dan nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ serta nilai β sebesar $9,391E-16$. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga H_2 diterima. Hal ini disebabkan karena pada hasil uji statistik deskriptif variabel pajak kendaraan bermotor memiliki nilai rata – rata tinggi yaitu sebesar 7,567. Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan Pontoh Irene F (2020), Savitri & Anggraeni (2021), Putri & Zahra (2020) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Kemauan wajib pajak dalam membayar biaya bea balik nama kendaraan bermotor salah satu bentuk kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (A A Nurfahmi 2018). Peningkatan pada bea balik nama kendaraan bermotor relevan dengan teori konstitusional yang dimana menjelaskan terkait persepsi yang mengatur perilaku individu (seseorang) yang ditentukan oleh suatu sebab eksternal yang dapat memacu pada lingkungan sekitar.

Pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli daerah

Berdasarkan hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel Pajak Air Permukaan memiliki hubungan yang negative terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dibuktikan bahwa nilai t_{hitung} sebesar $-1,587 < t_{tabel}$ 1,985 dan nilai signifikansi sebesar $0,116 > 0,05$ serta nilai β sebesar $-1,444E-14$. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

sehingga H_3 ditolak. Hal ini disebabkan karena pada hasil uji statistik deskriptif variabel pajak kendaraan bermotor memiliki nilai rata – rata rendah yaitu sebesar 4,714. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan Widya (2020) menyatakan bahwa pajak air permukaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak air permukaan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi terhadap pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan (Ayza 2017). Salah satu penyebab penurunan pada pajak air permukaan yaitu pengurangan atau menurunnya ukuran debit air di setiap daerah, masih banyaknya objek pajak yang belum membayarkan pajak air permukaan sehingga menimbulkan piutang. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Widya (2020) menghasilkan bahwa pajak air permukaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini relevan dengan teori konstitusional yang menjelaskan bahwa kebijakan suatu organisasi dibuat harus berdasarkan dengan ekspektasi dan lingkungan masyarakat.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan hasil hipotesis bahwa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji nilai F_{hitung} sebesar 4,718 dengan tingkat probabilitas (Sig.) 0,004. Hal ini artinya H_4 diterima, karena pada nilai probabilitas (Sig.) sebesar $0,004 < 0,05$. Dengan adanya pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan secara simultan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, sesuai dengan hipotesis yang telah dibangun sebelumnya.

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan merupakan faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah secara

positif. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Saputra & Putri (2019), Savitri & Anggraeni (202), Pontoh,Irene F (2020) menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Putri & Zahra (2020), Nurul Aliah et al (2019), Ferdiansyah (2020) menjelaskan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Delima (2022) menjelaskan bahwa Pajak Air Permukaan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2019 – 2021. Berdasarkan hasil dari pembahasan yang sudah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan yang terdapat pada pengujian penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menghasilkan satu hipotesis diterima, yaitu Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pada kedua hipotesis lainnya menghasilkan hipotesis yang ditolak yaitu Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, dikarenakan pada UPPD di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah kurang memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak.
2. Penelitian ini menghasilkan R Square yang kecil yaitu 12,7%, yang dikarenakan adanya keterbatasan dalam penggunaan variabel penelitian. Sehingga hal tersebut menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya dapat diulang dan ditambahkan variabel lain seperti variabel retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah karena variabel tersebut masih masuk dalam pengaruh peningkatan pendapatan asli daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Rukmana Is Lampunu, (2020) (Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) jurnal.stieykp.ac.id/index.php/prima-ekonomika/article/download/99/75
- Haryadi Wahyu,(2019) (Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat) e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jeb/article/view/538
- Saputra & Putri, (2020) (Pengaruh PKB, BBNKB, dan PBBKB Terhadap PAD Bangka Belitung) <https://journals.upiyai.ac.id/index.php/IKRAITHEKONOMIKA/article/download/1047/838>
- Galuh & Yunita, (2021) (Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur) <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v3i1.6574>
- Ferdiansyah, (2020) (Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah) <http://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7671>
- Delima & dkk, (2022) (Pengaruh Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan) <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi/article/view/7866>
- Pontoh & dkk, (2018) (Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara) <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.20076>
- Pangesti, (2020) (Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah) <https://core.ac.uk/download/pdf/335075179.pdf>
- Setiawan & Isporima, (2021) (Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat)

Wulandari & dkk, (2022) (Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat)

<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/3664/2714>

Yusmalina & dkk, (2020) (Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun Periode 2016 - 2018)

<https://doi.org/10.51742/akuntansi.v1i1.66>

Saputri, (2019) (Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara)

<http://dx.doi.org/10.35906/jep01.v5i1.334>

Widya, (2021) (Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli daerah Provinsi Kalimantan Selatan)

<https://doi.org/10.35972/kindai.v17i1.592>